

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 1, Nomor 2, April 2007

ISSN 1907-848X

Halaman 97 - 188

DAFTAR ISI

Editorial

**Pers dan Teknologi Media:
Dejurnalisasi di Tengah Konvergensi**
Didik Supriyanto - Iwan Awaluddin Yusuf
(97 - 109)

**Citizen Journalism:
Ketika Berita Tidak Hanya Memiliki Satu Muka**
Zaki Habibi
(110 - 120)

Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas
A. Darmanto
(121 - 132)

**Kegagalan Jurnalisme Profesional
dan Kemunculan Jurnalisme Publik**
Puji Rianto
(133 - 145)

Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik
Masduki - Bambang Muryanto
(147 - 154)

Praktik "Jurnalisme Syariah" di Radio MQ FM Yogyakarta
Abdul Rohman
(155 - 162)

Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis
Muzayin Nazaruddin
(163 - 177)

Mewaspadaai Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan
Ana Nadhya Abrar
(179 - 188)

Kegagalan Jurnalisme Profesional dan Kemunculan Jurnalisme Publik

*Puji Rianto*¹

Abstract

There are plenty of critics coming upon the professional journalism or on the journalism that rises up the objectivity and neutrality. Professional journalism is believed has failed to cover the democratization of political system and citizens. On the other hand, attempts on running over the objectivity and neutrality make it trapped on the higher orientation, to the public figures. In facing those kind of weakness, public journalism is coming over it. The basic orientation is how journalism ought to make itself as easy as possible for citizens to make intelligent decisions about public affairs, and to get them carried out.

Key words:

Professional journalism, democracy, public journalism

Pendahuluan

Dalam artikel yang ditulis untuk *Boston Globe*, 26 Desember 1999, Rosenstiel dan Kovach, penulis buku yang banyak dibaca saat ini, *Elemen-Elemen Jurnalisme*, mengajukan pertanyaan: Masih dapatkah jurnalisme menjadi kekuatan independen dalam masyarakat? Mengingat, seperti dikemukakan oleh Rosenstiel dan Kovach, eksistensi jurnalisme dalam masyarakat telah sedemikian bergeser. Ketika pasar masuk dalam bisnis berita, nilai-nilai profesional telah melakukan begitu banyak kompromi yang membuatnya tak lagi mampu melayani sistem politik demokrasi dengan baik. “*To the degree of society measures itself exclusively in terms of commerce, democracy is reduced to capitalism*”, demikian dikemukakan Rosenstiel dan Kovach. Dalam kaitan ini, produk jurnalisme tak lebih dari 'barang dagangan' yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Kritik serupa juga dikemukakan oleh salah seorang kritikus media terkemuka dewasa ini, Robert McChesney (1997; 2000; 2004; 2006). Dengan sinis, Chesney (2006) menyatakan bahwa segala sesuatu yang buruk dilakukan oleh jurnalisme pada masa lampau kini menjadi semakin buruk. Bidang-bidang yang dulu memadai, menurutnya, telah mengalami kemerosotan. Jurnalisme investigatif yang mahal--yang menabrak kepentingan korporasi-korporasi besar dan keamanan nasional--dihambat dan tidak mendapat tempat. Sebaliknya, berita-berita tragedi dan berita-berita idiot berkualifikasi *human interest* yang tidak relevan mendapatkan tempat liputan. Ini terjadi karena berita-berita semacam itu murah dan tidak mengandung risiko politik, terutama karena tidak mengancam penguasa politik dan kepentingan korporasi.

¹ Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), Yogyakarta.

Singkatnya, jurnalisme atau tepatnya jurnalisme profesional gagal melayani sistem politik demokrasi. Mereka gagal dalam menyediakan informasi yang berguna bagi warganegara untuk terlibat aktif dalam sistem politik demokrasi. Kenyataannya, seperti ditegaskan Herman dan Chomsky (1988), media pada dasarnya hanya merefleksikan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang dominan dalam masyarakat, yakni korporasi dan elit-elit politik. Dalam situasi semacam ini, muncullah banyak ketidakpuasan masyarakat, kritikus media, dan kalangan jurnalis yang penuh dedikasi. Ketidakpuasan tersebut dapat dilihat dari berbagai publikasi yang menyoal eksistensi jurnalisme dewasa ini, kemunculan berbagai aliran jurnalisme baru, dan dengan banyak alasan, kemunculan genre baru jurnalisme (misalnya jurnalisme damai, *civic* jurnalisme, dan jurnalisme publik). Itu semua harus dilihat sebagai respon atas kegagalan jurnalisme *mainstream*, yang dalam tulisan ini disebut sebagai jurnalisme profesional, jurnalisme konvensional atau sering dikenal sebagai jurnalisme objektivis. Suatu bentuk jurnalisme yang mendasarkan pada prinsip objektivitas dan netralitas (McQuail, 1992).

Latar belakang inilah yang membuat pembahasan tentang (kegagalan) jurnalisme konvensional menjadi menarik untuk dikaji. Pada bagian awal, sebagai konteks, akan dibahas dasar-dasar pemikiran filosofis yang mendasari pentingnya jurnalisme dalam sistem politik demokrasi. Tulisan pada bagian ini akan menunjukkan mengapa dalam sistem politik demokrasi pers harus bebas sehingga dapat melayani warga negara. Bagian selanjutnya akan membahas kegagalan-kegagalan jurnalisme profesional dalam sistem politik demokrasi. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas kemunculan jurnalisme publik yang dapat dianggap sebagai “koreksi” atas kegagalan jurnalisme profesional tersebut. Akhirnya, tulisan ini akan diberi catatan penutup untuk memberikan kesimpulan dan beberapa rekomendasi, terutama bagi jurnalisme profesional yang masih menjadi *mainstream* praktik jurnalisme dewasa ini.

Jurnalisme dalam Sistem Politik Demokrasi

Norberto Bobbio, ilmuwan sosiologi asal Italia (seperti dikutip McNair, 2003: 17) mengemukakan bahwa “*liberal democracy assumes that citizens, 'once they are entrusted with the right to choose who govern them', are sufficiently well-informed 'to vote for the wisest, the most honest, the most enlightened of their fellow citizens'*”. Dalam hal ini, tugas jurnalis adalah menyediakan informasi yang esensial bagi masyarakat sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) (Mencer, 2000: xi). Dari sini partisipasi warganegara dalam proses pengambilan keputusan tersebut menjadi efektif karena mereka mempunyai pemahaman yang memadai mengenai apa yang hendak diputuskan oleh para pejabat publik. Dalam situasi semacam ini, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan pers dan jurnalisme merupakan *elan vital* bagi bekerjanya sistem politik demokrasi. Keberadaan informasi yang disediakan oleh pers mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern.

Hachten (2005: xiv) mengemukakan bahwa informasi yang penting atau berguna akan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bidang-bidang seperti ekonomi, pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsinya tanpa adanya aliran berita dan informasi yang berkelanjutan.

Oleh karenanya, menurut Hachten, berita dan informasi menjadi semacam *lifeblood* dalam tubuh politik (*our body politic*). Dalam ungkapan Hachten, „*...democratic society without independent news media is imposible to imagine*“. Arti penting informasi dalam sistem politik demokrasi juga dapat dilihat pada kutipan berikut.

The democratic form of society....assumes that (its members) are sufficiently well informed...to be able to form the broad judgements required by an election, and to maintain between elections the vigilance necessary in those whose governors are their servants and their master...democratic society, therefore needs a clear and truthful account of events, of their background and their causes (Deklarasi A 1949 Royal Commision on The Press, dikutip dari Hachten, 2005: 271).

Dalam sistem demokrasi liberal, jurnalisme, barangkali, merupakan bagian dari industri bisnis, tetapi ia sekaligus bertindak sebagai institusi sosial. Dalam hal ini, D'Souza (1999: 3) mengemukakan bahwa pers dan jurnalisme merupakan industri bisnis, tetapi bisnis yang berbeda. Seorang jurnalis, menurut D'Souza, mempunyai beberapa kewajiban, tetapi kewajibannya yang paling utama adalah untuk melayani pembaca melalui informasi yang fair, positif, dan tepat waktu dalam format yang sesuai, mudah dicerna, dan menghibur. Para jurnalis harus memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat marginal dan berusaha melibatkannya dalam proses pembangunan. Ia harus bertindak sebagai penanda dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan jurnalisme (dan juga berita), sebagaimana dikemukakan James Fallows (1996) adalah dalam rangka memuaskan hasrat akan informasi dan maknanya (Hachten, 2005: 271). Orang-orang ingin mengetahui setiap detil informasi, maka keberadaan jurnalisme adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti “apakah yang tengah berlangsung?”, dan “mengapa hal tersebut dapat terjadi?”. Dalam usahanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, laporan berita hendaknya ditulis dengan objektif dan akurat agar sebuah berita kredibel dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, wartawan haruslah profesional, dalam pengertian bahwa ketika wartawan menuliskan berita harus menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas. Dalam perkembangannya, jurnalisme yang menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dikenal sebagai jurnalisme profesional dan mulai muncul pada awal abad ke-20.

Kegagalan Jurnalisme Profesional

Embrio jurnalisme profesional muncul pada era tahun 1930-an, para jurnalis terkemuka seperti George Seldes dan Heywood Broun memperjuangkan suatu visi jurnalisme profesional yang terbebas dari pengaruh kekejaman korporasi dan komersialisasi (McChesney, 2004, 2006). Menurut pandangan ini, sistem media tidak akan demokratis jika jurnalisnya membangun aliansi kepentingan dengan penerbit, pengiklan, dan pemerintahan-pemerintahan yang kuat, termasuk pemimpin-pemimpin bisnis, dan bukan pada pembaca. Oleh karena itu, jurnalisme harus objektif dalam arti bahwa para jurnalis harus bersikap netral dengan memisahkan secara tegas antara opini dengan fakta.

Dalam perkembangan selanjutnya, jurnalisisme objektivis ini paling banyak dipraktikkan dan menjadi acuan bagi standar kerja wartawan profesional. Oleh karenanya, ada baiknya jika sebelum membahas kegagalan-kegagalan jurnalisisme profesional, perlu dibahas terlebih dahulu apa makna objektivitas dalam pemberitaan. Perlu juga dibahas bagaimana pada akhirnya prinsip objektivitas ini, dalam pandangan beberapa pengamat, justru menghalangi pers menjadi institusi yang mampu melayani sistem politik demokrasi.

McQuail (1992: 183) mengemukakan bahwa sebuah berita dikatakan objektif jika memenuhi beberapa hal: (1) Laporan tersebut mempunyai tingkat faktualitas yang tinggi. Artinya, laporan tersebut menawarkan sebanyak mungkin detil dan dapat diperiksa (*checkable*); (2) Pembedaan yang jelas antara fakta pada satu sisi, dan pendapat atau interpretasi pada sisi lain; (3) Dimanapun memungkinkan, sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya disebutkan; (4) Berita harus tepat waktu dengan menyajikan versi yang paling baru menyangkut dampak suatu peristiwa hingga penilaian-penilaian yang paling awal tentang suatu peristiwa; (5) Menyajikan berita dalam intonasi dan presentasi yang netral, lebih-lebih dalam situasi konflik. Dari karakteristik di atas, objektif dalam pemberitaan mensyaratkan adanya penghilangan bias personal, kepentingan pribadi, dan motif-motif yang diorientasikan untuk melayani para pengiklan atau kelompok-kelompok ketiga.

Dalam *Discovering the News*, Michael Schudson, 1978 (seperti dikutip www.wikipedia.org) mengemukakan bahwa "*the belief in objectivity is a faith in 'facts', a distrust in 'values', and a commitment to their segregation*". Lebih jauh, Mencher (2000: 53) mengatakan bahwa ketika jurnalis berbicara tentang objektivitas maka yang ia maksudkan adalah berita yang bebas dari pendapat atau perasaan wartawan yang berisi tentang fakta dan yang berasal dari laporan independen dan tidak memihak. Sebuah berita dapat dikatakan objektif jika berita tersebut dapat dicek melalui bahan-bahan atau data-data terekam, misalnya, daftar gaji pegawai, naskah pembicaraan atau wawancara, data tentang tingkat pengangguran, statistik utama, dan lain sebagainya. Singkatnya, menurut Mencer (2000: 53), "*objective journalism is the reporting of visible, what people say and do*". "Kata kuncinya adalah netralitas", demikian diungkapkan oleh David S. Broder (1992: 386), wartawan *Washington Post*. Dalam *Berita di Balik Berita*, Ia mengatakan bahwa bersikap netral adalah salah satu nilai terpenting dalam hidup seorang wartawan. Netralitas atau imparialitas, demikian ia mengemukakan, merupakan bagian kode etik yang digunakan untuk menilai kerja wartawan, yang menjamin tidak adanya dukungan yang didasarkan atas ideologi dan hubungan-hubungan pribadi.

Bagi para jurnalis (McQuail, 1992: 183), memberikan laporan berita yang objektif merupakan jantung tugas mereka sebagai tujuan profesional. Tujuan ini tidak dapat diperoleh dengan mudah karena memerlukan cukup ketrampilan, usaha dan sumber daya yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga keseluruhan organisasi berita. Objektivitas tidak hanya dalam ukuran-ukuran jurnalis, tetapi juga melibatkan penilaian-penilaian *audiens*.

Meskipun prinsip objektivitas ini, sebagaimana dikemukakan Broder dan McQuail, merupakan prinsip utama etika jurnalisisme dan dianggap sebagai tugas jurnalis

yang paling utama, tetapi bukan berarti tanpa kritik. Kritik yang diajukan terhadap model jurnalisme objektivis ini berasal dari dua kutub. *Pertama*, gugatan atas kesahihan konsep objektivitas itu sendiri. Dalam kaitan ini, David S. Broder (1992: 15), mengajukan kritik sebagai berikut:

...kami bisa mengatakan saja apa yang kami ketahui, yaitu bahwa proses memilih apa yang akan disajikan kepada pembaca tidak hanya melibatkan fakta-fakta objektif, tetapi juga penilaian subjektif, nilai-nilai pribadi dan ya, prasangka. Alih-alih menjanjikan semua berita yang patut dicetak, saya lebih suka kami semua mengatakan-berulang-ulang, sampai benar-benar dipahami-bahwa koran yang dijatuhkan diambang pintu Anda adalah laporan yang ditulis secara sepihak, tergesa-gesa, tidak lengkap, pasti agak cacat dan tidak cermat tentang apa yang kami dengar dalam 24 jam lalu.

Objektivitas tidak mungkin terpenuhi dalam interaksi manusia, tidak terkecuali dalam dunia jurnalisme (Taflinger, 1996). Selama menjadi manusia, dalam proses pengumpulan dan penyebaran pesan, subjektivitas akan menjadi hukum, termasuk dalam jurnalisme. Jadi, menurut pandangan ini, tidak mungkin meraih objektivitas karena subjektivitas akan senantiasa mewarnai wartawan dalam memilih dan menyampaikan berita.

Kritik *kedua* berangkat dari kenyataan atas kegagalan jurnalisme objektivis ini dalam melayani warganegara dan sistem politik demokrasi. Robert McChesney (2006: 528-530) mengemukakan adanya tiga bias dalam dunia jurnalisme profesional. *Pertama*, untuk menghilangkan kontroversi yang terkait dengan pemilihan berita, ia memperhitungkan apapun yang dilakukan sumber-sumber resmi, misalnya, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh publik terkemuka sebagai basis menentukan berita yang layak. Menurut Chesney, penyandaran pada sumber-sumber resmi ini memberi kekuasaan besar bagi mereka yang mempunyai jabatan politik (dan, pada tingkatan yang lain bisnis) untuk menentukan agenda berita, terutama apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rahasiakan.

Kedua, selain alasan-alasan di atas, dalam rangka menghindarkan kontroversi, jurnalisme profesional berpendirian harus ada sangkutan atau cantelan berita untuk menjustifikasi kelayakan berita. Ini berarti, menurut Chesney, isu-isu sosial yang penting seperti rasisme atau degradasi lingkungan jatuh menjadi kerak jurnalisme jika tidak ada peristiwa tertentu, seperti demonstrasi atau keterangan resmi untuk menjustifikasi liputan. Ditambah dengan obsesi 'netralitas', jurnalisme cenderung merendahkan atau mengeliminasi penyajian suatu rentang sikap orang yang mempunyai pengetahuan mengenai isu-isu kontroversial. Sebaliknya, jurnalisme menghasilkan rentang opini elit tentang isu-isu yang diperdebatkan elit. Menurut Chesney, kondisi ini memunculkan semacam paradoks. Jurnalisme, yang dalam teori, seharusnya mengilhami kekusutan politik, tetapi justru cenderung menghilangkan makna politik dan mendorong depolitisasi yang berlangsung secara luas. Dengan kata lain, jurnalisme objektivis ini lantas terseret ke dalam bias elit politik dan menjadi 'bulan-bulanan' proyek *public relations* yang sengaja disewa elit-elit politik. Lebih buruk lagi, jurnalisme gagal menghadirkan

kebenaran kepada warga negara, tetapi terjebak ke dalam apa yang sering disebut sebagai "*official truth*" (Cunningham, 2003).

Dalam situasi demikian, orientasi jurnalisme lebih bersifat ke atas (kepada elit-elit politik) dan bukannya kepada warganegara. Dengan kata lain, jurnalisme tidak lagi mampu melayani kepentingan warganegara dan sistem politik. Pada kenyataannya, jurnalisme telah kehilangan kemampuan untuk berhubungan dengan seluruh lapisan warga negara, khususnya kaum miskin dan buruh. Wartawan dan media lebih cenderung untuk meliput pejabat dan orang-orang terkenal sebagai bahan berita dibandingkan dengan mengendus persoalan-persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ini karena program liputan semacam ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat laporan investigatif. Oleh karenanya, Kovach dan Rosenstiel (2001) benar ketika mengatakan bahwa media cenderung memfokuskan diri pada apa yang dikatakan pejabat dibanding memfokuskan pada apa yang mereka lakukan. Padahal, apa yang mereka lakukan akan mempunyai dampak langsung terhadap warganegara dibanding apa yang mereka katakan. Namun ironisnya, menurut Kovach dan Rosenstiel, wartawan lebih suka melakukan pilihan yang pertama.

Bias ketiga jurnalisme profesional, sebagaimana diidentifikasi Chesney, jauh dari titik netral secara politik, jurnalisme atau media menyelundupkan nilai-nilai yang kondusif bagi tujuan komersial pemilik dan pemasang iklan serta tujuan politik golongan pemilik. Akibatnya, berita-berita tentang kejahatan, keluarga-keluarga kerajaan, dan selebritis menjadi berita yang layak. Masih dalam aras ini pula, media pada hakikatnya menjadi penjaga status quo, dan gagal menjadi agen perubahan sebagaimana sering diteorikan. Liputan jurnalisme yang bias elit telah memandulkan jurnalisme dari tugas pokoknya untuk melayani kepentingan-kepentingan warganegara dan sistem politik demokrasi. Sebaliknya, lebih berorientasi pada kepentingan elit dan pemodal (lihat juga Herman dan Chomsky, 1988).

Hilangnya Konteks Jurnalisme Profesional

Orientasi jurnalisme pada pengejaran keuntungan yang berlebihan dibandingkan dengan melayani warganegara telah membuat jurnalisme tergoda untuk hanya sekadar melayani keinginan-keinginan warganegara dibandingkan dengan melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam kaitan ini, John C. Merrill (2005) mengemukakan bahwa apa yang diberikan media kepada publik adalah apa yang mereka inginkan dan bukannya apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, di bawah bayang-bayang kapitalisasi media yang berujung pada pengejaran keuntungan, media menggambarkan dunia dengan cara yang negatif. Dunia penuh kejahatan, ketidakjujuran, imoralitas, dan kriminal. Menurut Merrill, kondisi ini berasal dari dua sistem jurnalisme, yakni otoritarianisme dan liberalisme. Pandangan otoritarianisme melihat berita yang layak hanya berasal dari pemerintah. Sementara itu, tradisi libertarian menelurkan hal-hal negatif, sensasional, dan berita yang menghibur adalah jenis berita yang paling layak jual.

Charlotte Denet (2006: 79), wartawan investigatif yang lama menghabiskan waktunya untuk liputan-liputan di Timur Tengah, memberikan komentar atas peristiwa 9/11 yang menghebohkan itu. Menurutnya, "...kini, tiga tahun setelah 9/11, dan dengan

kian bertambahnya jumlah korban Amerika, warga Amerika tidak juga kian memahami mengapa umat Islam “begitu membenci kita” atau apa yang sesungguhnya terjadi di Irak”. Ini terjadi, sebagaimana ditegaskan Dennet, karena media-media *mainstream* sangat lambat melakukan investigasi dan memenuhi tugas mereka sebagai “pilar keempat demokrasi”. Media-media arus utama telah merepresentasikan diri menjadi 'mesin kekuasaan' yang dengan jeli digunakan oleh Washington dan para pejabat Gedung Putih guna melakukan manipulasi kebenaran menyangkut keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Alih-alih media mempertanyakan keabsahan informasi tersebut, sebaliknya, media hanya mengesahkan begitu saja tipe kebenaran versi pejabat dan gagal menempatkan fakta dalam konteks yang benar. Dengan tegas, Dennet mengatakan bahwa salah satu kelemahan besar laporan media *mainstream* adalah kegagalan menempatkan fakta dalam konteks. Sekolah-sekolah dan universitas juga mengidap kekurangan ini. Ini menjelaskan mengapa orang Amerika tampak naif, bahkan bodoh. Mereka sebetulnya tidaklah demikian. Mereka hanya butuh konteks. Konteks minyak, konteks geografis, konteks kelas penguasa, konteks historis-semua tersembunyi dari pandangan rata-rata orang Amerika.

Kritik serupa dikemukakan oleh Charnley (1966; seperti dikutip Blake dan Haroldsen, 2005: 62). Ia memberikan suatu pandangan bahwa fakta-fakta dalam masyarakat modern sangatlah kompleks. Dalam hal ini, individu-individu dalam masyarakat tidak mempunyai cukup kemampuan memilah-milah fakta dan memberikan perspektif terhadap fakta tersebut. Akibatnya, fakta jurnalisme diterima begitu saja oleh masyarakat dan dijadikan acuan bagi tindakan-tindakan ekonomi, sosial, politik, dan mungkin juga budaya. Akibatnya, ketika jurnalisme tidak memberikan konteks maka pilihan-pilihan tindakan warganegara menjadi salah arah. Inilah yang terjadi pada media-media Amerika ketika krisis Irak terjadi. Media hanya menyandarkan pada kutipan-kutipan yang berasal dari Gedung Putih atau pihak administrasi George Bush (Chomsky, 2006). Bahkan, dalam kasus Perang Teluk misalnya, media di Amerika terlibat dalam penyesatan-penyésatan informasi yang dilakukan oleh Gedung Putih (Kellner, 1992). Meskipun berita-berita ini nampak objektif karena menghadirkan opini-opini orang penting tanpa memberikannya komentar, tetapi opini tersebut bersifat manipulatif. Opini para pejabat Gedung Putih ini didesain dalam rangka mendapatkan dukungan terhadap invasi AS ke Irak ataupun Perang Teluk, dan nampaknya berhasil.

Jurnalisme profesional gagal memberikan konteks dalam setiap liputannya karena pemberian konteks akan membuatnya menjadi nampak tidak netral (Chesney, 2004). Akibatnya, beritanya menjadi kering dan kurang bermakna bagi publik. Padahal, jurnalisme, sebagaimana dapat dirujuk pada epistemologinya, bekerja untuk kepentingan-kepentingan publik atau warganegara (Siregar, 2006; Kovach dan Rosenstiel, 2001). McQuail, dalam *McQuail's Mass Communication Theory* (2000), mengemukakan bahwa jurnalisme tidak hanya menyangkut proses pengumpulan dan penyebaran informasi, tetapi informasi tersebut harus diorientasikan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, hasil produk jurnalisme dalam bentuk berita atau informasi seyogianya berpihak pada kepentingan publik, bukan berpihak pada kepentingan kekuasaan.

Dalam kaitan ini, Ashadi Siregar (1993b: 396) mengemukakan bahwa pers hendaknya menjalankan fungsi memenuhi tujuan pragmatis masyarakat, psikologis maupun sosial. Informasi ditujukan untuk memenuhi kepentingan pragmatis khalayak dan bukan kepentingan pragmatis yang menjadi sumber informasi. Mesin-mesin kekuasaan menyimpan kecenderungan dalam dirinya untuk menguasai media massa, dan menjadikan dirinya sebagai sumber informasi. Menurut Ashadi, ini merupakan hal yang tidak terelakkan. Oleh karenanya, menjadi tugas wartawan untuk mendeteksi sejauh mana suatu informasi bersih dari kepentingan pragmatis sumber informasi. Terlebih, jika dilihat bahwa sebagai mesin kekuasaan, sumber informasi dapat mendominasi media massa. Ketika realitas sosiologis yang hadir dalam media harus melalui 'mulut' pejabat, maka wartawan tengah mengidap apa yang ia sebut sebagai *inferiority complex* (Siregar, 1993b: 396). Dalam situasi semacam ini, sulit membayangkan proses terbentuknya masyarakat yang egaliter, apalagi jika pers menjadikan realitas psikologi (opini) tokoh-tokoh masyarakat menjadi *banner headline*. Khalayak dibanjiri *news of the spoken words*, jenis pemberitaan yang terasa ganjil. Gejala ini, menurut Masmiar Mangiang (1993: 329) sering mendorong munculnya pertanyaan, "Apakah sebenarnya kini yang dianggap sebagai berita?" atau "Apakah wartawan paham apa yang dibutuhkan pembaca?"

Tak pelak, gejala ini juga menghinggapi dunia jurnalisme Indonesia. Pada masa Orde Baru, muncul istilah jurnalisme "tukang tadah" (Mangiang, 1993: 396). Maksudnya, jurnalisme hanya menjadi penampung pidato dan pendapat para pejabat publik. Sementara pada masa reformasi, muncul istilah "jurnalisme ngrumpi", "jurnalisme omongan", atau "jurnalisme rekaman" (Ibrahim, 2001: 3). "Teknik jitungnya", demikian menurut Idi Subandy Ibrahim, "Tentukan narasumber, rekam omongannya, transkrip seakurat mungkin, seleksi, tulis, dan beritakan apa adanya". Kecenderungan ini telah membuat jurnalisme gagal menangkap esensi peristiwa dan makna di belakangnya. Orientasi untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah membuat para wartawan tergoda untuk menyiarkan berita dengan mengambil titik tekan sudut pandang pejabat. Ketika memberikan komentar atas dunia pendidikan yang mengalami transformasi besar-besaran, Ariel Heryanto membandingkannya dengan dunia media dan wartawan sebagaimana dapat dilihat pada kutipan berikut:

Ini sama barunya dengan gejala pengiklanan industri wartawan berita, baik cetak maupun televisi. Orang membuat berita bukan karena ada peristiwa penting, dan orang mengikuti berita bukan karena butuh informasi tentang dunia. Yang terjadi adalah orang berjualan berita dan publik membeli hiburan dan gosip (Ibrahim, 2001: 4-5).

Apa yang dikemukakan beberapa pengamat di atas menjadi cermin kondisi media dan jurnalisme di Indonesia dewasa ini. Kuatnya orientasi mengejar keuntungan membuat laporan-laporan bermutu menjadi berkurang, dan jurnalisme terjebak hanya sekedar menyampaikan realitas sosial dan politik versi pejabat. Sepertinya, berita tidak akan bernilai tinggi jika tidak mengutip pejabat. Bagi sementara kritikus, ini disebabkan, salah satunya, kuatnya para wartawan menganut jurnalisme objektivis dalam peliputan mereka.

Munculnya Publik Jurnalisme

Meluasnya gagasan dan praktik jurnalisme publik tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan atas praktik jurnalisme konvensional (Charity, 1995: 1). Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, jurnalisme konvensional atau jurnalisme objektivis gagal melayani warganegara dan sistem politik demokrasi. Warganegara yang seharusnya mereka layani tidak lagi mempunyai kepercayaan yang cukup terhadap berita-berita yang mereka tulis dan lebih-lebih tidak lagi mempunyai minat untuk membaca. Pergeseran ke arah *market-driven journalism* sebagai akibat tekanan-tekanan pasar tak pelak membuat kualitas jurnalisme mengalami penurunan. Berbagai persoalan yang seharusnya dapat dipecahkan oleh peran jurnalisme ternyata tetap *absurd*. Ada atau tidak ada jurnalisme, masyarakat tetap diliputi berbagai masalah. Kondisi ini berlangsung terus, bahkan semakin buruk. Berbagai isu muncul begitu saja dalam realitas media tanpa kemampuan untuk memberikan pemahaman terhadap warganegara dengan lebih baik. Padahal, filosofi demokrasi menegaskan pentingnya partisipasi warga negara, dan partisipasi semacam ini hanya mungkin jika mereka mendapatkan informasi yang cukup. Ketika warganegara terinformasi dengan baik, maka mereka akan mampu terlibat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik yang berlangsung.

Jurnalisme konvensional gagal menyediakan informasi semacam ini. Hasrat para jurnalis untuk mengejar objektivitas dan netralitas telah membuatnya lebih berorientasi ke atas, yaitu para pejabat publik. Dalam situasi semacam ini, bukan saja jurnalisme terjebak ke dalam apa yang sering disebut sebagai kebenaran versi pejabat (*official truth*), tetapi sebaliknya menempatkan warga masyarakat sebagai pendengar pasif.

Kegagalan-kegagalan di atas telah memunculkan keprihatinan yang mendalam di kalangan para veteran jurnalis (Charity, 1995: 1). Para wartawan (khususnya yang memiliki dedikasi tinggi) melihat kecenderungan yang semakin besar atas menurunnya kualitas jurnalisme. Kepercayaan terhadap jurnalisme semakin menurun, sementara masyarakat sebagai warganegara yang harus mereka layani ternyata juga semakin menurun minat bacanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya yang ditujukan untuk mendorong kebangkitan kembali ruh jurnalisme yang sesuai dengan kodratnya. Maka, pada tahun 1989, muncullah gagasan jurnalisme publik ke permukaan.

Hingga saat ini, belum ada definisi yang baku mengenai jurnalisme publik (Rosen, 1999; seperti dikutip Ito, 2005: 44). Meskipun demikian, bukan berarti belum ada seorang wartawan atau akademisi yang berusaha mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jurnalisme publik, dan bagaimana jurnalisme ini dipraktikkan.

Dalam *Doing Public Journalism*, Charity (1995: 9) mendefinisikan jurnalisme publik sebagai berikut: "*Public journalism is nothing more than the conviction that journalism's business is about making citizenship work. In practice, there is only the pioneering, sometimes contradictory work of dozens of very loosely connected editor and reporters*".

Jurnalisme publik bukan hanya merupakan cara bagaimana melaporkan peristiwa, tetapi juga merupakan suatu cara berpikir (*a way of thinking*), suatu filosofi yang berkenaan dengan demokrasi, dan hubungan antara media dengan demokrasi.

Dalam kaitan ini, jurnalisme merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam proses demokrasi. Jurnalisme harus membantu warganegara (*citizens*) dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, menurut Ito (2005: 43), gerakan jurnalisme publik merupakan hal paling menarik karena mendorong kita untuk merefleksikan kebebasan berekspresi, menyarankan bahwa kebebasan berekspresi bukan merupakan kebebasan negatif (bebas dari), tetapi merupakan kebebasan positif yang menghendaki setiap orang atau warganegara memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pembuatan keputusan bagi komunitas mereka.

Sebagai gerakan yang dapat dianggap sebagai antitesis atas kegagalan-kegagalan jurnalisme profesional, jurnalisme publik mempunyai beberapa aspek yang berbeda jika dibandingkan dengan jurnalisme profesional. Setidaknya, ada lima perbedaan mendasar antara kedua jenis jurnalisme sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perbedaan-Perbedaan Keyakinan antara Wartawan yang Menyelenggarakan Jurnalisme Publik dengan Jurnalisme Konvensional

No	Keyakinan Jurnalisme Publik	Keyakinan Jurnalisme Konvensional
1	Jurnalis publik percaya sesuatu yang mendasar harus berubah karena tradisi jurnalisme saat ini tidak dapat bekerja dengan baik.	Tradisi jurnalis sudah baik, jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki maka itu hanyalah soal praktik.
2	Dalam kondisi tertentu, eksperimentasi dan kreativitas bersifat imperatif; kebiasaan-kebiasaan lama bahkan yang sakral mungkin harus diubah meskipun perubahan harus selalu diarahkan atau dibimbing oleh nilai-nilai etis dan pemahaman tentang bagaimana demokrasi bekerja.	Eksperimentasi dapat mengarahkan pada perilaku yang tidak etis, bias, dan kecerobohan. Di samping itu, eksperimentasi sama dengan keisengan saja.
3	Warganegara sangat mungkin ingin berpartisipasi dalam kehidupan publik secara lebih cerdas, tetapi mereka menemui banyak hambatan dalam usaha mereka itu.	Kehidupan media dan politik memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Bila orang-orang tidak peduli atau mengeluh maka itu merupakan pilihan mereka sendiri.
4	Warganegara berhak atas tempat yang lebih besar dalam surat kabar. Surat kabar seharusnya tidak pernah menggurui, tetapi harus mengorientasikan diri mereka di sekitar masalah warganegara.	Berita berkenaan dengan sebuah profesi (jurnalis). Jurnalislah yang menulis surat kabar, bukan pembaca. Mengundang warganegara untuk menentukan apa itu berita, menjadikan mereka sebagai subjek liputan, dan hal-hal sejenis yang menggurui adalah sebuah perbuatan keji.
5	Kehidupan publik harus berjalan baik dan jurnalisme memiliki peran untuk mewujudkan.	Memang akan menyenangkan bila kehidupan publik berjalan dengan baik, tetapi itu di luar kewajiban kita dan kita tidak perlu berpikir bahwa kita bisa.

Sumber: Arthur Charity. 1995. *Doing Public Journalism*. New York and London: The Guilford Press, hal. 10.

Dari perbedaan-perbedaan di atas, nampak bahwa jurnalisme publik lebih merupakan koreksi atas "kearifan" jurnalisme konvensional. Jurnalisme publik merupakan upaya, sebagaimana dikatakan di awal, untuk mengembalikan ruh jurnalisme yang tidak lagi mampu melayani warganegara dan sistem politik demokrasi. Berita-berita dangkal dan tidak menyentuh kebutuhan warganegara membuat jurnalisme kehilangan ruhnya. Dalam melakukan hal ini, Charity (1995: 11) menyarankan adanya tiga posisi yang dapat diambil oleh para jurnalis yang ingin menyelenggarakan jurnalisme publik. *Pertama*, jurnalisme publik merupakan ahli dalam kehidupan publik. Ini jelas berbeda dengan jurnalisme konvensional yang mensyaratkan para jurnalis menempatkan diri sebagai 'reporter' yang menyampaikan berita secara objektif, dan pada akhirnya justru terjebak menjadi penyampai realitas versi pejabat. Jurnalisme publik mendorong adanya proses komunikasi yang sejajar antara kelompok-kelompok masyarakat, baik dari para profesional, pejabat publik ataupun warganegara biasa.

Kedua, jurnalisme publik merupakan *civis capitalists*. Dalam hal ini, jurnalis perlu mengintroduksi konsep "*civic capital*" yang disandingkan dengan apapun yang dapat memperbaiki produktivitas komunitas, termasuk di dalamnya kemampuan menemukan krisis, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jurnalis hendaknya tidak hanya mampu membantu keputusan-keputusan jangka panjang, tetapi sekaligus memperkuat niat baik komunitas, kebiasaan untuk kerjasama, pengetahuan tentang dari mana kelompok-kelompok sosial yang lain berasal, dan sebagainya.

Ketiga, seluruh waktu dan aktivitas jurnalisme publik bagi warga negara (*full-time citizens*). Jurnalisme konvensional melihat bahwa orang-orang yang membeli koran-koran merupakan pembaca; jurnalis publik sebaliknya melihat bahwa orang-orang tersebut sebagai warganegara. Cara pandang ini, tentunya, mempunyai implikasi menyangkut bagaimana orang-orang tersebut diperlakukan. Dalam pandangan jurnalisme publik, warganegara mempunyai kedudukan setara. Oleh karenanya, dalam ruang media dan jurnalisme, mereka harus diberi ruang yang sama. Jurnalisme konvensional terlalu menekankan pada pejabat publik sebagai sumber informasi, dan menempatkan masyarakat biasa sebagai pendengar dan pembaca koran. Jurnalisme publik berusaha melayani—dalam usahanya untuk menciptakan—warga negara, dan jika para jurnalis ini gagal, maka sama halnya dengan kegagalan historis semboyan Amerika bahwa semua "manusia diciptakan sederajat".

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan di atas adalah kenyataan bahwa jurnalisme profesional mempunyai banyak kelemahan yang membuatnya gagal melayani warganegara dan sistem politik demokrasi. Demokrasi memerlukan masyarakat yang terinformasi dengan baik (*well-informed*) karena hanya masyarakat semacam inilah yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses politik. Jurnalisme profesional yang orientasi utamanya mengejar objektivitas gagal menciptakan masyarakat yang *well-informed*. Sebaliknya, jurnalisme konvensional terjebak untuk hanya menyiarkan pendapat-pendapat pejabat tanpa memberi ruang yang cukup kepada warga negara. Jurnalisme publik berusaha menutupi kelemahan-

kelemahan ini dan menempatkan warganegara sebagai pihak yang harus dilayani secara sederajat. Jurnalisme, sebagaimana dikemukakan oleh Charity (1995: 2), "ought to make it as easy as possible for citizens to make intelligent decisions about public affairs, and to get them carried out".

Daftar Pustaka

- Blake, Reed H. dan Edwin O. Haroldsen. 2005. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya: Papyrus.
- Broder, David S. 1992. *Berita di Balik Berita*. Edisi terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Charity, Arthur. 1995. *Doing Public Journalism*. New York and London: The Guilford Press
- Cunningham, Brent. 2003. "Re-thinking Objectivity". www.cjr.org/issues/2003/4/objective-cunningham.asp
- Dennett, Charlotte. 2006. "Perang Melawan Teror dan Permainan Besar Minyak: Bagaimana Media Kehilangan Konteks", diedit oleh Kristina Borjesson (ed.) *Mesin Penindas Pers: Membongkar Kebebasan Pers di Amerika*. Bandung: Q-Press.
- D'Souza, Y.K. 1999. *Function and Areas of Journalism*. India: Dominant Publishers and Distributor.
- Hachten, William A. 2005. *The Troubles of Journalism: A Critical Look at What's Right and Wrong With the Press*. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Herman, Edward S dan Noam Chomsky. 2002. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
<http://www.journalism.org/resources/publications/articles/indepforce.asp>
- Ibrahim, Idi Subandy. 2001. "Watak Berita dalam "Jurnalisme Ngerumpi". *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. VI/November 2001.
- Ito, Takashi. 2005. "Public Journalism and Journalism in Japan". *Keio Communication Review*. No. 27 2005, hal. 43-63.
- Kelner, Douglas. 1992. *The Persian Gulf TV War*. Boulder, San Fransisco, Oxford: Westview Press.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2001. *Elemen-Elemen Jurnalisme*. Jakarta: ISAI
- Mangiang, Masmiar. 1993. "Laporan dari Sikatan". Dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo W (eds.). 1993. *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh Tahun Surabaya Post*. Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya.
- McChesney, Robert W. 1997. "The Communication Revolution: The Market and the Prospect for Democracy", edited by Mashoed Bailie and Dwayne Winseck. *Democratizing Communication?: Comparative Perspectives on Information and Power*, Cresskill, New Jersey: Hampton Press Inc..
- _____. 2000. *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. New York: The New York Press.

- _____. 2004. *The Problem of the Media: US Communication Politics in the 21st Century*. New York: Montly Review Press.
- _____. 2006. "Jatuh Bangunnya Jurnalisme Profesional". Dalam Kristina Borjesson (ed.) *Mesin Penindas Pers: Membongkar Kebebasan Pers di Amerika*. Bandung: Q-Press.
- McNair, Bryan. 2003. *An Introduction to Political Communication*. third edition. London and New York: Routledge.
- McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications.
- _____. 2000. *Mass Communication Theory*, 3th edition, London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publications.
- Mencher, Melvin. 2000. *News Reporting and Writing*. Boston: McGraw Hill, hal. 53.
- Merrill, John C. 2005. "Professionalization: Fusion of Media Freedom and Responsibility". *Global Media Journal*. Volume 4, Issue 6, Spring 2005.
- Rosenstiel, Tom dan Bill Kovach, 1999. "Can Journalism Remain an Independent Force in Society?" *Boston Globe*, 26 Desember 1999.
- Siregar, Ashadi. 1993a. *Etika Komunikasi*. Laporan Penelitian Kepustakaan, Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM.
- _____. 1993b. "Membangun Institusi, Membangun Jiwa Bebas". Dalam Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnono W. 1993. *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh Tahun Surabaya Post*. Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya
- _____. 2006. "Dari Kode Etik Wartawan Indonesia ke Dewan Pers". Dalam *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*. Jakarta: Dewan Pers dan Yayasan Tifa
- Taflinger, Richard F. 1996. "The Myth of Objectivity in Journalism: A Comentary", <http://www.wsu.edu/~taflinge/mythobj.html>

